

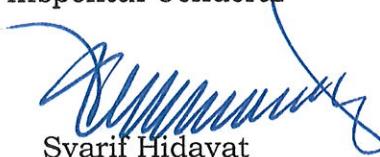
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian untuk tahun anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Perindustrian. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan infomasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 18 Februari 2015

Inspektur Jenderal



Syarif Hidayat

NIP. 195612131985031001

Kata Pengantar

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut Tap MPR RI dan Undang-Undang tersebut, mewajibkan tiap pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2014. Laporan ini diarahkan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kinerja satuan unit dimasa yang akan datang.

Jakarta, 25 Februari 2015

Menteri Perindustrian,



Saleh Husin